

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai usaha serta aktivitas yang ada didalamnya, salah satunya adalah persoalan laporan keuangan. PSAK No.1/2017 Paragraf 3 menyatakan bahwa Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi dari kinerja, penentu usaha maupun pergantian posisi keuangan dalam suatu entitas yang akan berfungsi bagi sebagian besar kepada para penggunanya dalam menentukan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan dan sumber informasi atau alat komunikasi antara suatu entitas dengan pihak yang berkepentingan seperti investor. Dalam merencanakan investasinya seorang investor menjadikan laporan keuangan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan opini perusahaan yang telah diberikan oleh auditor internal perusahaan.

Penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi akan menghasilkan output informasi keuangan yang sangat berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan sebagai bahan pengukur kinerja manajemen dalam perusahaan dan memperkirakan laba yang akan terjadi di masa depan. Kualitas laporan keuangan mengartikan hubungannya dengan penyedia jasa informasi keuangan yang transparan, penuh dan tidak diciptakan untuk memanipulasi data yang menyesatkan pengguna laporan keuangan Wiwin & Abdulloh, (2017:30).

Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) merupakan salah satu bagian dari *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di Indonesia atau biasa yang dikenal dengan SAK. Dimana suatu prinsip yang mengharuskan akuntan membuat keputusan dengan mempertimbangkan banyak penilaian yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Keputusan tersebut perlu menyediakan segala kemungkinan kerugian dan tidak mengantisipasi keuntungan yang belum terealisasi. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama konservatisme akuntansi. Secara intuitif prinsip konservatisme bertujuan karena dapat digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif yang ditawarkan dan dianggap telah sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini.

Prinsip akuntansi menyatakan agar setiap laporan keuangan perusahaan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak yang independen atau netral dari segala hal yang dapat mempengaruhi atau menekan manajemen perusahaan sebelum dikatakan layak untuk dipublikasikan yaitu seorang akuntan publik atau yang biasa disebut auditor. Auditor memiliki wewenang dalam mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen Matius, (2016:83). Data – data yang tertera pada laporan keuangan yang telah di audit akan memberikan kepercayaan yang lebih bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi sesuai dengan gambaran perusahaan terhadap data yang tercantum dalam laporan keuangan.

Akuntan publik akan mendapatkan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap profesional akuntan publik apabila memiliki eksistensi yang baik. Akuntan publik harus memperhatikan hasil yang telah dikerjakan dan memiliki kompetensi yang cukup bagus agar masyarakat dapat menggunakan jasanya. Sehingga, sebagai pihak yang independen auditor diperlukan untuk memberikan pendapat yang independen dalam menilai kewajaran serta mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang bermasalah menurut Adriansono dkk,(2015:127). Kenyataannya saat ini banyak terjadi manipulasi data akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan dari integritas laporan keuangan dimana penyajian informasi yang disajikan secara tidak wajar dapat menjadi perhatian yang cukup besar bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor dan analis keuangan.

Kasus terkait mengenai manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk yang merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. Dan kegiatan ini lolos dari pengawasan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan salah satu *Big Four* auditor internasional Ernest & Young ([detikfinance.co.id](http://detikfinance.co.id)).

Kasus lainnya mengenai pendugaan manipulasi laporan keuangan PT. SNP untuk mendapatkan investasi dari Bank NTT senilai Rp 50 Miliar. Bank NTT merugi sekitar Rp 50 M akibat investasi yang tidak prudent pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Perusahaan pembiayaan tersebut tak mampu membayar investasi Medium Term Notes (MTN) kepada Bank NTT dan bank lainnya sebesar Rp 1,85 Trilyun ([nttonlinenow.com](http://nttonlinenow.com)). Dan kasus pada PT Hanson International yang telah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (kasiba) dengan nilai gross Rp 732 Miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Pihak OJK mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh, meskipun dalam LKT 2016 transaksi tersebut tidak diungkapkan di LKT 2016 ([Kompas.com](http://Kompas.com)).

Berdasarkan fenomena tersebut sebagian besar melibatkan berbagai pihak seperti keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, auditor internal bahkan auditor eksternal dan menimbulkan dampak negatif yang cukup serius yaitu dengan menurunnya kepercayaan terhadap pemakai laporan keuangan dan integritas laporan keuangan. Keraguan atas integritas laporan keuangan akan mengakibatkan banyak pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) oleh pemakai laporan keuangan. Sehingga penerapan serta pengawasan *corporate governance* atas terjadinya kasus-kasus manipulasi keuangan akan menjadi pertanyaan dan perhatian khusus. Perusahaan dalam mengukur integritas laporan keuangan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.

Faktor yang pertama adalah komisaris independen, komisaris independen merupakan posisi yang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan demi terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan tujuannya untuk menjaga keseimbangan pengambilan keputusan serta perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dengan pihak – pihak lain yang terkait Widodo, (2016:10). Komisaris independen seharusnya dapat berperan efektif melalui komite audit dalam mendeteksi dini (*early warning*) mengenai kecurangan maupun penyimpangan disuatu perusahaan, karena komisaris independen juga dapat berperan sebagai ketua komite audit. Langkah – langkah yang diambil oleh komisaris independen dapat berupa pencegahan maupun usulan – usulan atas perbaikan sistem. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang diberikan merupakan kunci sukses yang dapat menentukan keberhasilan atas pelaksanaan terhadap tugas yang diembannya.

Penelitian oleh Irawati & Fakhrudin (2016) dan Verya (2017) didapatkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun, berbeda dengan yang dinyatakan oleh Ariantoni (2017) yang menunjukkan bahwa Komisaris independen memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Dwidinda dkk (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap integritas laporan keuangan karena mengacu pada tugasnya komisaris independen hanya melakukan pengawasan terhadap tata kelola

perusahaan sehingga tidak mempengaruhi bagian-bagian dalam menilai integritas laporan keuangan.

Faktor yang kedua adalah kepemilikan manajerial, merupakan peran ganda seorang manajer dimana manajer bertindak sebagai pemegang saham dan juga seorang manajer. Hal tersebut dapat membantu penyatuan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dalam laporan keuangan, hal ini akan menunjukkan besaran persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Semakin besar pengaruh kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka integritas laporan keuangan yang dimiliki perusahaan cenderung memiliki tanggung jawab yang besar bagi manajemen dalam mengelola perusahaan Setiawan (2015:43). Kepemilikan manajerial dirasa lebih efektif dalam melakukan control bagi para manajemen perusahaan dan menjalankan aktivitas ekonomi perusahaan karena seorang manajer memiliki motivasi dalam meningkatkan kinerjanya serta dalam menentukan pengambilan keputusan yang baik bagi kesejahteraan perusahaan dan menyajikan laporan keuangan yang bertanggung jawab, jujur dan wajar.

Pada variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian oleh Setiawan (2015), Mudasetia dan Solikhah (2017) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang memiliki arti bahwa besar atau kecilnya suatu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap variasi nilai integritas. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verya (2017), Styawan (2018), Ni Kadek dan I Made (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor yang ketiga adalah kepemilikan institusional, merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh beberapa institusi seperti institusi keuangan, luar negeri, institusi berbadan hukum, pemerintah, dana perwalian dan beberapa institusi lainnya Zahra et al (2018). Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai pengawas yang efektif untuk manajemen. Karena informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan akan terbebas dari salah saji material Nurdinia & Pradika (2017: 174). Pengawasan yang tinggi harus dilakukan agar dapat meminimalkan agency problem yang terjadi akibat dari adanya pemisahan

antara fungsi pengelola dan kepemilikan. Salah satu upaya dalam melakukan pengawasan yaitu dengan adanya kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional diharapkan mampu mengatur kinerja seorang manajemen serta menghindari permasalahan yang akan timbul akibat dari asimetri informasi. Investor institusional juga diperlukan untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen untuk bekerja secara fokus dan mengurangi pengelola dalam melakukan tindakan *earnings management* sehingga dapat meminimalisir kegiatan oportunistik untuk kepentingan pribadi serta meningkatkan kemakmuran dari pemegang saham Istiantoro et al (2017: 160).

Sehingga hal ini diasumsikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi integritas laporan keuangan. Sebaliknya, jika semakin rendah kepemilikan institusional maka integritas laporan keuangan akan semakin rendah. Hal tersebut, sejalan dengan penelitian oleh Zahra (2018), Zendra (2017) dan Qonitin & Yudowati (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan hal yang berbeda dengan penelitian oleh Widiyati & Shanti (2017), Nur Solikhah (2017) dan Arista (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena dengan adanya kepemilikan pihak institusi dirasa kurang maksimal dalam melakukan pengawasan serta monitoring pada perusahaan terhadap manajemen dan institusional hanya berfokus pada *current earnings*.

Faktor yang keempat adalah komite audit, komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan direksi dan memiliki tugas dalam mengaudit keadaan dan operasional, melakukan pengawasan secara independen serta menilai kinerja suatu perusahaan kantor akuntan publik. Komite audit didirikan untuk melengkapi dewan komisaris yang memiliki wewenang dalam menilai kegiatan atas hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal. Jumlah suatu komite audit harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan serta efektifitas dalam menetapkan pengambilan keputusan. Bagi beberapa perusahaan yang sahamnya telah tercatat di perusahaan daerah, perusahaan negara, bursa efek, perusahaan yang jasa dan produknya digunakan oleh masyarakat luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit yang dikepalai oleh komisaris independen

serta anggotanya terdiri dari beberapa komisaris atau seorang profesi dari eksternal perusahaan. Komite audit yang berjalan dengan baik bagi perusahaan akan memberikan dampak yang baik bagi transparansinya penyajian laporan keuangan perusahaan Yulinda dkk (2016:180).

Penelitian oleh Aghnia dkk (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah proporsi komite audit mampu meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi didalam suatu perusahaan. Karena dengan banyaknya jumlah komite audit akan memberikan keseimbangan antara pemegang saham dan pihak manajemen Arista et al (2018). Berbeda dengan hasil penelitian oleh Anita dkk (2016) dan Habibie (2017) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena keberadaan komite audit yang kurang dapat menjembatani komunikasi antar pembuat laporan keuangan dan memastikan terpenuhinya standar, atau dengan kata lain, fungsi komite audit sebagai pengawas dan penelaah laporan keuangan serta sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit kepada dewan direksi tidak berjalan dengan seharusnya. Sehingga, komite audit dianggap kurang mampu dalam meminimalisir tindak kecurangan terhadap pelaporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Financial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2016 – 2019)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dirumuskan pada masalah berikut :

- 1) Apakah komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan ?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan ?
- 3) Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan ?
- 4) Apakah komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap Integritas Laporan Keuangan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan  
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi di Perpustakaan STEI Jakarta dan menjadi sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai topik-topik yang



berhubungan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

2) Bagi Regulator (Pembuat Kebijakan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dalam rangka memberikan kepercayaan kepada para penggunanya bagi pengambilan keputusan investasi.

a. OJK

Meningkatkan level of awareness kepada setiap perusahaan keuangan yang terdaftar di OJK terhadap Integritas Laporan Keuangan agar memberikan dampak yang positif dan penting untuk dilakukan dalam memajukan perusahaan di Indonesia menjadi yang lebih baik dan dapat dipercaya.

b. BEI

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi badan pengatur di Bursa Efek Indonesia seperti BAPEPAM dalam mengawasi laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan dan membantu badan pengatur dalam meningkatkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang lebih terintegritas.

c. IAI

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan agar lebih berintegritas.

3) Bagi Investor

Investor dalam hal ini adalah pemilik perusahaan, diharapkan dapat memberikan acuan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit yang berguna bagi pengambilan keputusan.